



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI EKONOMI MAKRO DAN FISKAL
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ferry Ardiyanto

Jabatan : Plt. Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Edi Prio Pambudi

Jabatan : Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama
Ekonomi dan Investasi

Edi Prio Pambudi

Pihak Pertama,

Plt. Asisten Deputy Ekonomi
Makro dan Fiskal

Ferry Ardiyanto

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN DEPUTI EKONOMI MAKRO DAN FISKAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang Berkualitas	1.1	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk Investor Relation Unit (IRU) dan Recent Economic Development (RED)	100%
		1.2	Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal	100%
2.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal	2.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal	3 dari 4
3.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang Profesional	3.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal	92%

Kegiatan

1. Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal

Total

(Satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Anggaran

Rp. 1.234.792.000,-

Rp. 1.234.792.000,-

Pihak kedua,

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama
Ekonomi dan Investasi



Edi Prio Pambudi

Pihak Pertama,

Plt. Asisten Deputi Ekonomi
Makro dan Fiskal



Ferry Ardiyanto

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

ASISTEN DEPUTI BIDANG EKONOMI MAKRO DAN FISKAL	KODE IKU: IBP.1
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI	
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	SS.1 Terwujudnya Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Terkait dengan itu mengamanatkan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro dan fiskal yang menjalankan fungsinya sebagai:</p> <p>a) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro dan fiskal;</p> <p>b) Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro dan fiskal;</p> <p>c) Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro dan fiskal;</p> <p>d) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi makro dan fiskal; dan</p> <p>e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU. 1.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, serta Pengendalian Kebijakan di Bidang <i>Investor Relation Unit</i> (IRU) dan <i>Recent Economic Development</i> (RED)
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih, dan dokumen lain yang relevan).</p> <p>Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Investor Relations Unit</i> (IRU) 2. <i>Recent Economic Development</i> (RED) <p>Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan</p> <p>Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.</p>

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- *Investor Relation Unit* (IRU) bulanan (Januari-Maret) yang difokuskan pada pembahasan mengenai *Macroeconomic Sector*;
- *Recent Economic Development* (RED) Triwulan I yang difokuskan pada perkembangan ekonomi global dan perdagangan Internasional;
- Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan FGD terkait Strategi Perdagangan Indonesia di Tengah Kebijakan Perdagangan Global.
- Beberapa isu ataupun substansi terkait perkembangan ekonomi global dan domestik, prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- *Investor Relation Unit* (IRU) bulanan (April-Juni) yang difokuskan pada pembahasan mengenai *Real Sector & Investment Environment*;
- *Recent Economic Development* (RED) Triwulan II yang difokuskan pada Ketahanan Sektor Eksternal di awal tahun 2026;
- Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan FGD terkait Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi Global
- Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait perkembangan ekonomi global dan domestik, prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;

	<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan); • Memo Kebijakan; • Hasil Konsultasi; • Laporan Hasil Evaluasi; • Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. <p>Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Investor Relation Unit</i> (IRU) bulanan (Juli-September) yang difokuskan pada pembahasan mengenai <i>Financial & External Sector</i>; dan 2. <i>Recent Economic Development</i> (RED) Triwulan III yang difokuskan pada investasi. 3. Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait perkembangan ekonomi global dan domestik, prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya. <p>Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik</p> <p>Pada tahapan ini transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen) • Memo Kebijakan; • Rancangan Kebijakan; • Hasil Konsultasi; <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini Adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Investor Relation Unit</i> (IRU) bulanan (Oktober – Desember) yang difokuskan pada pembahasan mengenai Economic Structural Reform & Transformation; 2. <i>Recent Economic Development</i> (RED) Triwulan IV yang difokuskan pada Strategi kebijakan Pemerintah; dan 3. Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait perkembangan ekonomi global dan domestik, prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya. 	
	Formula	
	<p>1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama</p> $\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$ <p>2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua</p> $\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$ <p>3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga</p> $\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}}$ <p>4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat</p> $\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan untuk Investor Relation Unit (IRU) dan Recent Economic Development (RED)</p> $\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$	
	Tujuan	
	<p>Untuk Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Investor Relation Unit (IRU) dan Recent Economic Development (RED)</p>	

Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal		
Sumber Data	Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	100%	100%	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	25%	25%	25%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	50%	50%	50%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	75%	75%	75%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	100%	100%	100%

ASISTEN DEPUTI BIDANG EKONOMI MAKRO DAN FISKAL	KODE IKU: IBP.2
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI	
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	SS. 2 Terwujudnya Kebijakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Terkait dengan itu mengamanatkan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro dan fiskal yang menjalankan fungsinya sebagai:</p> <p>a) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden, berupa sinkronisasi dan koordinasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro dan fiskal;</p> <p>b) Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro dan fiskal;</p> <p>c) Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro dan fiskal;</p> <p>d) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi makro dan fiskal; dan</p> <p>e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU.1.2. Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 (empat) dimensi yaitu Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).</p> <p>Adapun kegiatan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Diagnosa Ekonomi Makro yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Analisis investasi (domestik dan asing) - Analisis perdagangan internasional - Evaluasi daya saing ekonomi Ketahanan Fiskal yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Analisis belanja negara - Analisis pembiayaan APBN - Analisis penerimaan negara

- Evaluasi risiko fiskal dan kesinambungan fiskal

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) dimensi siklus proses bisnis dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- Diagnosa Ekonomi Makro terkait perdagangan internasional dan investasi;
- Ketahanan Fiskal terkait belanja negara;
- Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait arah kebijakan fiskal Indonesia, realisasi dan proyeksi APBN, stabilitas utang dan kebutuhan pembiayaan, kerentanan fiskal dan faktor risiko, investasi, dan/atau substansi lainnya.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- Diagnosa Ekonomi Makro terkait perdagangan internasional;
- Ketahanan Fiskal terkait pembiayaan;
- Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait arah kebijakan fiskal Indonesia, realisasi dan proyeksi APBN, stabilitas utang dan kebutuhan pembiayaan, kerentanan fiskal dan faktor risiko, investasi, dan/atau substansi lainnya.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

	<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan; • Kertas Kerja Kebijakan; • Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan); • Memo Kebijakan; • Hasil Konsultasi; • Laporan Hasil Evaluasi; • Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. <p>Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagnosa Ekonomi Makro terkait perdagangan internasional; • Ketahanan Fiskal terkait penerimaan negara; • Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait arah kebijakan fiskal Indonesia, realisasi dan proyeksi APBN, stabilitas utang dan kebutuhan pembiayaan, kerentanan fiskal dan faktor risiko, perdagangan internasional dan/atau substansi lainnya. <p>Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik</p> <p>Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen) • Memo Kebijakan; • Rancangan Kebijakan; • Hasil Konsultasi; <p>Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini Adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagnosa Ekonomi Makro terkait investasi; • Ketahanan Fiskal terkait belanja negara • Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait arah kebijakan fiskal Indonesia, realisasi dan proyeksi APBN, stabilitas utang dan kebutuhan pembiayaan, kerentanan fiskal dan faktor risiko, investasi, dan/atau substansi lainnya. 	
Formula		
	<p>1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama</p> $\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$ <p>2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua</p> $\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$ <p>3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga</p> $\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}}$ <p>4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat</p> $\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5$ <p>5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal</p> $\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$	
Tujuan		
	Mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal	

Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal		
Sumber Data	Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	100%	100%	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	25%	25%	25%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	50%	50%	50%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	75%	75%	75%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	100%	100%	100%

ASISTEN DEPUTI BIDANG EKONOMI MAKRO DAN FISKAL	KODE IKU: C.1
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI	
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	SS.3 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Kegiatan	<p>Layanan yang berkualitas merupakan layanan yang diselenggarakan secara profesional dan berstandar, dengan orientasi pada kebutuhan pengguna, sehingga mampu memberikan kepastian proses, kemudahan akses, serta hasil layanan yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, layanan yang berkualitas ditandai dengan kemampuan penyelenggara layanan dalam merespons kebutuhan, masukan, dan permasalahan pengguna secara cepat, tepat, dan solutif, serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas dan terukur. Pada Sasaran kegiatan ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal dalam memberikan fasilitas dan sarana layanan yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan fiskal; Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan fiskal; Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi makro dan fiskal; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU.2. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal
Deskripsi IKU	Definisi
	<p>Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal mengukur indikator tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan meliputi: ketanggapan dalam pelayanan (responsiveness), kehandalan dalam pelayanan (reliability), sarana dan prasarana fisik (tangible), kepastian dalam pelayanan (assurance), dan sikap dalam pelayanan (empati); dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan meliputi: koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian pelaksanaan kebijakan, pengelolaan dan penanganan isu, penyelesaian isu di bidang perekonomian, dan pengawalan program prioritas nasional. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p>
	Formula
	<p>Mengukur indikator tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><i>Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi</i></p> $\text{Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Jumlah dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$
	Tujuan
	Mengukur tingkat kepuasan di proses sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan terkait dengan ekonomi makro dan fiskal sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.
Satuan Pengukuran	Indeks

Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal		
Sumber Data	Hasil survey Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	3 dari 4	3,89	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	3 dari 4	3,85	3 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dari 4
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	3 dari 4	4	3 dari 4

ASISTEN DEPUTI BIDANG EKONOMI MAKRO DAN FISKAL	KODE IKU: LG.1
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI	
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Kegiatan	SS.4 Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang Profesional
-------------------------	--

Deskripsi Sasaran Kegiatan	Terwujudnya tata kelola Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang profesional merupakan sasaran kegiatan yang berfokus pada Perspektif Learning and Growth dan merupakan turunan dari sasaran kegiatan Perspektif Learning and Growth level ke deputian yakni Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Profesional. Ketercapaian sasaran kegiatan ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang profesional.
-----------------------------------	--

Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU.3. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal
--------------------------------------	--

Deskripsi IKU	Definisi
----------------------	-----------------

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal.

Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Adapun Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal sebagai berikut:

Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Optimalisasi Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal Tahun 2026	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Penyusunan Renja 2026 Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Penyusunan Revisi Renja 2026 Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja Penyusunan Matriks Manajemen Risiko Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026 Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027 Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI Pengisian <u>Survey</u> Penilaian Integritas (SPI)

Formula

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal:

$$\%Pelaksanaan Renaksi RB = \frac{Total\ Renaksi\ RB\ yang\ dilaksanakan}{Total\ Renaksi\ RB\ yang\ dirumuskan} \times 100\%$$

Tujuan

	Untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal		
Sumber Data	Rekapitulasi/ Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	85%	85%	92%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	20%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	40%	40%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	60%	60%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	85%	85%	92%

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN DEPUTI EKONOMI MAKRO DAN FISKAL
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI DAN INVESTASI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang Berkualitas	1. Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk <i>Investor Relation Unit</i> (IRU) dan <i>Recent Economic Development</i> (RED)	100%	Penguatan Koordinasi dan penyusunan laporan serta analisis IRU dan RED dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan stabilitas sektor eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi IRU dan Penyusunan Laporan bulanan <i>presentation book</i> IRU (edisi Januari, Februari, dan Maret) yang difokuskan pada pembahasan mengenai <i>Macroeconomic Sector</i> • Koordinasi dan Penyusunan laporan RED Triwulan I yang difokuskan pada perkembangan ekonomi global dan perdagangan internasional • Pelaksanaan FGD terkait Strategi Perdagangan Indonesia di Tengah Kebijakan Perdagangan Global 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi IRU dan Penyusunan Laporan bulanan <i>presentation book</i> IRU (edisi April, Mei, dan Juni) yang difokuskan pada pembahasan mengenai <i>Real Sector & Investment Environment</i> • Koordinasi dan Penyusunan laporan RED Triwulan II yang difokuskan pada ketahanan sektor eksternal di awal tahun 2026 • Pelaksanaan FGD terkait Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi Global 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi IRU dan Penyusunan Laporan bulanan <i>presentation book</i> IRU (edisi Juli, Agustus, dan September) yang difokuskan pada pembahasan mengenai <i>Financial & External Sector</i> • Koordinasi dan Penyusunan laporan RED Triwulan III yang difokuskan pada investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi IRU dan Penyusunan Laporan bulanan <i>presentation book</i> IRU (edisi Oktober, November, dan Desember) yang difokuskan pada pembahasan mengenai <i>Economic Structural Reform & Transformation</i> • Koordinasi dan Penyusunan laporan RED Triwulan IV yang difokuskan pada strategi kebijakan pemerintah
		2. Persentase Efektifitas Sinkronisasi,	100%	Penguatan Koordinasi dan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan penyusunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan penyusunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan penyusunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan penyusunan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal		penyusunan laporan analisis terkait kebijakan ekonomi makro dan fiskal adaptif untuk mendorong investasi dan hilirisasi	Diagnosa Ekonomi Makro berkaitan dengan perdagangan internasional & investasi • Koordinasi dan penyusunan Ketahanan Fiskal berkaitan dengan belanja negara	Diagnosa Ekonomi Makro berkaitan dengan perdagangan internasional • Koordinasi dan penyusunan Ketahanan Fiskal berkaitan dengan pembiayaan	Diagnosa Ekonomi Makro berkaitan dengan perdagangan internasional • Koordinasi dan penyusunan Ketahanan Fiskal berkaitan dengan penerimaan negara	Diagnosa Ekonomi Makro berkaitan dengan investasi • Koordinasi dan penyusunan Ketahanan Fiskal berkaitan dengan belanja negara
2.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal	3 dari 4	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal 	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Penguatan substansi kuisioner survey yang lebih mudah dipahami responden 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Penguatan kapasitas SDM dalam berkoordinasi lintas K/L melalui penyamaan pemahaman substansi ekonomi makro dan fiskal 	<ul style="list-style-type: none"> Tindak lanjut hasil survey tahap I (Triwulan II) dan identifikasi masukan sebagai evaluasi Survey kepuasan layanan Tw II Persiapan Pelaksanaan Survei Tahap 2 Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Survei Tahap 2 dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Evaluasi efektivitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan ekonomi makro dan fiskal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
3.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang Profesional	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal	92%	Optimalisasi Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal Tahun 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan Renja 2026 • Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan Revisi Renja 2026 • Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja • Penyusunan Matriks Manajemen Risiko • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026 • Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027 • Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI • Pengisian Survey Penilaian Integritas (SPI)

Jakarta, 31 Januari 2026

Plt. Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal



Ferry Ardiyanto
NIP 197603191996021002